

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berjalannya waktu, kini persaingan di dunia industri semakin pesat dengan adanya program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menuntut para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Indonesia, sebagai negara berkembang, pada tahun 2020 akan memasuki pasar bebas dengan 21 negara lainnya di kawasan Asia Pasifik, (Wardhani, 2006). Hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi sebagian pelaku usaha di Indonesia. Peningkatan kualitas dan kapasitas dari pelaku usaha merupakan salah satu solusi untuk menghadapi pasar bebas yang ada didepan mata. Hal ini dimulai dengan melakukan berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Dewi & Sari, 2019).

UMKM adalah aktivitas ekonomi masyarakat yang berdiri sendiri serta berskala kecil, dikelola oleh masyarakat atau pribadi, (Tuti, 2014). UMKM telah memberikan kontribusi yang begitu penting dan sangat besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia, selain itu UMKM memiliki kelebihan yaitu mampu bertahan dalam menghadapi kondisi krisis dengan tetap bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan krisis global 2008, (Sulisti, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menetapkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang sudah di

jelaskan dalam pasal 48, pemegang Izin Usaha wajib menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha, menyusun pembukuan dari kegiatan usaha dan melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan, (Dewi dan Sari 2019). Namun pada praktiknya banyak pelaku usaha yang masih belum sadar dan mau menerapkan hal tersebut.

Faktor yang menjadi kendala UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM adalah kesadaran akan pentingnya laporan keuangan belum dimiliki oleh pelaku UMKM, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM serta pengetahuan tentang SAK EMKM yang dimiliki masih minim, (Sholikin dan Setiawan, 2018). Pengetahuan pelaku usaha menengah tentang SAK EMKM dilihat dari kemampuan pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai unsur dan struktur laporan keuangan yang berlaku sesuai SAK EMKM. Sedangkan kesiapan usaha menengah merupakan keadaan dimana pelaku usaha telah mampu untuk mengimplementasikan sebuah standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Setiap usaha di harapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan untuk menganalisis kinerja, sehingga dapat memberikan informasi mengenai keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah ada, (Sulisti, 2019).

Selanjutnya, DSAK-IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 8 Desember 2016, yang

bertepatan dengan ulang tahun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang ke-59. Dimana waktu itu wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan yang sama ketua dewan pengurus nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Mardiasno mengungkapkan bahwa “ SAK EMKM diterbitkan untuk membantu meningkatkan akuntabilitas UMKM dan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel”. Hal itu sesuai dengan tujuan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM yakni untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. SAK EMKM ini dilakukan secara efektif per 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia agar memperoleh akses yang semakin luas untuk permodalan serta diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, (Sulisti, 2019).

Terdapat beberapa kekhususan standar dalam SAK EMKM, yaitu komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan hanya dengan basis biaya historis, tidak adanya pengakuan pengukuran nilai kecuali untuk entitas bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan regulator terkait, aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu, laporan komparatif cukup disajikan hanya dengan 1 periode sebelumnya, dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan

akuntansi diperlukan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan, entitas yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan asumsi dasar kas mengubah laporan keuangan tersebut menjadi akrual dengan melakukan penyesuaian pada akhir periode laporan dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2019) menunjukkan hasil analisis bahwa sudah hampir seluruh pelaku usaha menengah mengetahui tentang

dasar akuntansi serta aturan mengenai SAK EMKM sehingga telah siap dan mampu dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) hasil penelitian menunjukkan pada 3 UMKM pengrajin mebel yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, dan Mebel Morodadi ditemukan bahwa ketiga UMKM tersebut belum siap menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangan mereka. Hal tersebut dikarenakan ketiga UMKM itu masih belum mengetahui dan memahami tentang SAK EMKM, belum pernah membuat laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan,

tidak ada pegawai khusus untuk menyelenggarakan pembukuan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismadewi, Herawati, dan Atmaja 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) proses penyusunan laporan

keuangan usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa hanya menyusun catatan keuangan secara sederhana, (2) kendala yang dihadapi oleh usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yaitu; (a) faktor SDM (sumber daya manusia), (b) tingkat kompetensi, dan (c) lingkup organisasi yang kecil, (3) penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

SAK EMKM pada usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa terdiri dari; (a) Laporan laba rugi, (b) laporan posisi keuangan, dan (c) catatan atas laporan keuangan.

Usaha kecil saat ini di Kabupaten Lumajang semakin meningkat, hal tersebut beriringan dengan semakin meningkatnya sektor pariwisata. Masyarakat kini memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dari usaha kecil perlu adanya kesiapan dari para pelaku usaha terkait dalam penerapannya. Karena beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut masih belum diterapkan sepenuhnya, bahkan sebagian usaha kecil ini sama sekali tidak menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan, apalagi pelaku usaha kecil yang bertempat di desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro saat ini telah memiliki sektor pariwisata yang bisa dikatakan berkembang sehingga menarik wisatawan lokal, hal tersebut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan membuat usaha kecil. Namun masih banyak yang perlu diperhatikan karena minimnya modal dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) menyebabkan usaha kecil di wilayah tersebut tidak memiliki usia usaha yang cukup lama. Hal tersebut tidak terlepas dari catatan hasil operasionalnya yakni laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesiapan Usaha Kecil dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro”.

## **1.2 Batasan Penelitian**

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang dan arah yang jelas, penulis dalam penelitian ini membatasi pada:

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai pedoman penelitian usaha kecil.
2. Kesiapan usaha kecil di lihat dari; pengetahuan penerbitan SAK EMKM, sistem pencatatan akuntansi, konsep entitas bisnis, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan usaha kecil dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan usaha kecil dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro.

### **1.5 Manfaat penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh dan dipelajari dibangku kuliah ke dalam dunia kerja.
  - b. Bagi pembaca merupakan bahan informasi mengenai analisis kesiapan usaha kecil dalam implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan menengah (SAK EMKM)

## 2. Manfaat secara akademis

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, terutama bagi mahasiswa STIE Widya Gama Lumajang.

